

Kondisi Politik Pascapemilu 2024: Sudut Pandang Juru Parkir

Eva W. Kafiar¹, Michael Allesandro Donardi,² Dhaniel Rahmadin³, Destri Ferdianisa⁴, Michelle Felicia Acorda⁵.

¹²³⁴⁵Program Studi Sosiologi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
211007583@students.uajy.ac.id

Untuk mengutip artikel ini:

Kafiar, E. W., Donardi, M. A., Rahmadin, D., Ferdianisa, D., & Acorda, M. F. (2025). Kondisi Politik Pascapemilu 2024: Sudut Pandang Juru Parkir. *Working Papers Laboratorium Sosiologi FISIP UAJY*, 11(1), 31–40.

ABSTRAK

Studi ini berupaya untuk mendeskripsikan pandangan juru parkir sebagai representasi masyarakat kelas bawah terhadap pemerintahan baru pascapemilu 2024. Secara kualitatif, melalui wawancara dengan 10 informan di Yogyakarta, ditemukan harapan besar dari mereka terkait dengan perbaikan di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemberantasan korupsi. Para informan juga menyoroti pentingnya komunikasi politik yang inklusif serta keberlanjutan dari program-program pemerintah sebelumnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Program Indonesia Pintar (PIP). Peningkatan lapangan kerja dan layanan publik juga menjadi hal-hal yang mereka soroti.

Kata Kunci: harapan; juru parkir; komunikasi politik; pascapemilu 2024

ABSTRACT

This study attempts to describe the views of parking attendants, as representatives of lower-class communities, regarding the new government after the 2024 elections. Qualitatively, through interviews with 10 informants in Yogyakarta, they revealed high hopes for improvements in the economic, education, and health sectors, and the eradication of corruption. The informants also highlighted the importance of inclusive political communication and the sustainability of previous government programs, such as the Family Hope Program (PKH), the Non-Cash Food Security Program (BPNT), and the Smart Indonesia Program (PIP). They also highlighted improvements in employment and public services.

Keywords: expectations; parking attendants; political communication; post-2024 election government

PENDAHULUAN

Pemilihan presiden Indonesia 2024 merupakan salah satu momen paling penting dalam sejarah politik negara ini. Setelah dua periode kepemimpinan Joko Widodo, rakyat Indonesia kembali menggelar pesta politik secara masif. Namun, jika dilihat dari catatan sejarah politik, kontestasi politik tahun ini banyak memberikan catatan krusial pascareformasi tentang bagaimana adanya campur tangan kekuasaan untuk salah satu pasangan yang dipertontonkan secara terbuka di hadapan publik, baik itu keberpihakan presiden, keterlibatan menteri-menteri untuk andil berkampanye, sistem perhitungan Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi Suara) yang problematik dan dugaan penyalahgunaan aparaturnya negara hingga politisasi bantuan sosial menjelang hari-hari pemilihan berlangsung.

Meskipun menemui banyak kegagalan, pemilu kali ini dapat terlaksana secara serempak di seluruh Indonesia pada 14 Februari 2024 lalu dan dimenangkan oleh pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut dua, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Perolehan suara yang diraih oleh paslon nomor urut dua ini mencapai 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional. Torehan suara Prabowo-Gibran mengungguli dua pasangan calon lainnya, yakni Anies Baswedan & Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara (24,95%) dan Ganjar Pranowo & Mahfud MD yang meraih 27.040.878 suara (16,46%) (Santika, 2024). Pada Oktober 2024 mendatang, capres dan cawapres yang terpilih akan dilantik untuk mengemban tugasnya.

Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki sistem pemilihan umum secara periodik, yakni dilakukan setiap lima tahun untuk memilih presiden dan wakil presiden serta calon-calon legislatif lainnya. Berkenaan dengan hal ini, maka partisipasi warga negara juga sangat penting untuk menjaga dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Warga negara yang terlibat pun berasal dari berbagai demografi, baik itu masyarakat kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Dalam proses pemilu, masyarakat yang terpenuhi sebagai pemberi suara memiliki hak pilih untuk memilih calon presiden dan wakilnya serta caleg lainnya yang dianggap paling sesuai dengan aspirasi dan harapan mereka.

Sebagai warga negara, juru parkir pun menjadi partisipan dalam melihat dinamika politik yang terjadi di Indonesia, secara khusus pada pemilu capres dan cawapres 2024 ini. Juru parkir adalah orang yang bekerja sebagai penjaga dan pengatur kendaraan yang diparkir di suatu area. Mereka bertanggung jawab untuk membantu pengemudi menemukan tempat parkir yang tersedia, memastikan kendaraan diparkir dengan aman dan teratur, serta membantu menjaga kelancaran lalu lintas di area parkir. Juru parkir ini dapat ditemukan di berbagai tempat seperti pusat perbelanjaan,

perkantoran, rumah sakit, restoran, dan tempat-tempat umum lainnya. Juru parkir memainkan peran penting di berbagai area publik, namun seringkali bekerja tanpa jaminan formal dan pendapatan yang tidak menentu.

Juru parkir menjadi target kelompok untuk melakukan penelitian tentang pandangan masyarakat terhadap kondisi politik di Indonesia karena mereka termasuk kalangan masyarakat yang termarginalisasi atau hak mereka sering diabaikan oleh pemerintah. Melalui survei sederhana ini, kelompok akan mengkaji perspektif juru parkir terkait dengan sikap mereka pada saat pemilu, tantangan atau masalah yang akan dihadapi oleh pemerintah baru, dan berbagai program pemerintah yang perlu diteruskan, serta program kerja baru yang harus diwujudkan. Harapannya, survei yang dilakukan oleh kelompok ini dapat berupaya untuk memberikan apresiasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kontribusi penting juru parkir dalam kehidupan perkotaan.

METODE

Kami mewawancarai 10 juru parkir di area perkotaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Rentang usia mereka adalah dari 24 hingga 55 tahun. Sembilan dari 10 informan adalah laki-laki. Rata-rata pendidikan terakhir mereka adalah SMA atau SMK dengan dua orang berpendidikan terakhir S1. Tidak semua menjadikan juru parkir sebagai pekerjaan primer. Ada informan yang pekerjaan primernya adalah mengendarai ojek dan guru SD. Wawancara dilakukan di beberapa titik, yakni Tambakbayan, Kledokan, Tegalrejo, dan Malioboro.

Tabel 1. Daftar informan yang diwawancarai (nama disamarkan)

No	Nama (Samaran)	Jenis Kelamin (L/P)	Usia (tahun)	Pendidikan	Lama Bekerja (tahun)	Lokasi Wawancara
1	Ngadiran	L	55	SMA	8	Malioboro
2	Hengki	L	41	SMA	7	Tambakbayan
3	Roni	L	26	SMK	2	Malioboro
4	Suromo	L	32	S1	6	Malioboro
5	Kuncoro	P	45	SMA	4	Tegalrejo
6	Joko	L	24	S1	3	Malioboro
7	Jono	L	38	SMA	2	Malioboro
8	Santosa	L	42	SMA	8	Malioboro
9	Purwanto	L	53	SMP	4	Malioboro

10	Suratman	L	32	SMA	6 bulan	Koat Coffee (Kledokan)
----	----------	---	----	-----	---------	---------------------------

Sumber: dokumen tim peneliti.

Di dalam proses pengumpulan data ini, terutama di wilayah Malioboro, ada beberapa juru parkir yang menolak diwawancarai. Alasannya adalah karena mereka masih harus bekerja, sementara saat itu jam sudah menunjukkan pukul 21:00 WIB. Akhirnya kami menunggu hingga pukul 22:00 WIB, saat di mana para juru parkir sudah tidak bekerja lagi, untuk mewawancarai mereka. Alasan kedua adalah banyak juru parkir yang mengatakan bahwa mereka tidak terlalu mengikuti perkembangan politik, sehingga mereka menolak wawancara.

TEMUAN & PEMBAHASAN

Temuan

Temuan survei sederhana ini kami sajikan secara urut berdasarkan 5 pertanyaan wawancara.

Pertanyaan 1: Apa harapan Anda terhadap pemerintahan baru (presiden dan wakil presiden) yang akan dilantik pada Oktober 2024? Apa alasannya?

Bagi masyarakat bawah seperti juru parkir, mereka merasa bahwa harga bahan pangan perlu diturunkan sehingga pengeluaran mereka kecil. Jika harga bahan pokok melambung tinggi dan pengeluaran mereka besar, maka mereka tidak akan memiliki tabungan lebih untuk memenuhi kebutuhan pokok lainnya, seperti biaya pendidikan anak, biaya berobat, dan lain sebagainya. Secara khusus, mereka yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), BPJS atau kartu tunjangan lainnya akan lebih mengalami kesulitan.

Selain harga bahan pangan, para juru parkir juga berharap agar pemerintah yang baru menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Mereka sepakat bahwa pemilihan pekerjaan mereka ini dilatarbelakangi oleh kurangnya lapangan pekerjaan. Mayoritas dari mereka berpendapat bahwa pembukaan lapangan pekerjaan yang baru perlu diperbanyak sehingga mereka juga bisa mendapatkan hasil/pendapatan yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan primer.

Peningkatan sektor pariwisata juga menjadi harapan mereka. Juru parkir yang berada di kawasan Malioboro mengaku bahwa sektor pariwisata dan UMKM di kawasan ini perlu diperluas lagi agar menarik banyak pengunjung. Jika banyak pengunjung yang berdatangan ke area ini, maka pendapatan mereka akan semakin meningkat. Terlebih jika pengunjung-pengunjung tersebut menghabiskan waktu yang lama di kawasan ini, di mana harga tarif parkir akan dinaikkan dan mereka

mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Perhitungannya adalah untuk parkir dua jam pertama dikenakan biaya sebesar Rp2.000,-, sedangkan untuk tiga jam dan seterusnya dikenakan Rp5.000,- bagi kendaraan roda dua. Lalu, untuk roda empat biayanya menjadi Rp10.000,-.

Dalam aspek layanan kesehatan, juru parkir yang menjadi masyarakat golongan bawah merasa bahwa biaya pengobatan tanpa BPJS dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) terbilang sangat mahal. Sayangnya, banyak masyarakat kecil yang kesulitan mengakses BPJS dan KIS karena dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan mereka perihal cara mendapatkan kartu ini. Maka dari itu, juru parkir berharap bahwa komunikasi terkait layanan ini dimaksimalkan. Mereka juga berharap memperoleh pelayanan yang bermutu meskipun menjadi anggota BPJS dan KIS. Menurut mereka layanan kesehatan yang diberikan tidak maksimal.

Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa biaya pendidikan masih tinggi. Karena upah yang rendah, terkadang mereka harus menunggak pembayaran sekolah untuk anak-anak mereka. Mereka berharap agar pemerintah menurunkan biaya pendidikan agar tetap terjangkau.

Korupsi juga menjadi persoalan yang mereka soroti. Merespon itu, mereka berharap agar pemerintah yang baru menjadikan pemberantasan korupsi sebagai fokus utama. Jika korupsi tidak dituntaskan secara maksimal, sebaik-baiknya program pemerintah, maka akan sia-sia.

Pertanyaan 2: Program kerja apa dari pemerintahan baru yang Anda harapkan harus diwujudkan? Apa alasannya?

Seorang informan yang juga merangkap kerja sebagai pengemudi ojek online mengatakan bahwa UMR (Upah Minimum Regional) di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu ditingkatkan. Tingkat upah yang tidak terlalu rendah akan membuat orang tidak melakukan pekerjaan lebih dari satu. Ojek online adalah satu-satunya pekerjaan yang sangat terbuka. Namun, pengemudi justru sering mengeluarkan biaya untuk menutupi kekeliruan saat bekerja, misal salah menurunkan pelanggan yang tidak sesuai titik lokasi pemesanan. Masih terkait dengan lapangan kerja, para informan berharap agar pemerintah yang baru ini membuka pabrik baru sehingga mampu meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan.

Para informan juga berharap agar pemerintah yang baru meningkatkan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), dan BPJS. Mereka menilai bahwa bantuan-bantuan ini sangat membantu perekonomian masyarakat kecil. Selain itu, peningkatan

perekonomian masyarakat kecil, menurut mereka, juga dapat dilakukan dengan peningkatan keterampilan kerja bagi para pekerja informal.

Terakhir, mereka berharap agar pemerintah meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pengajarnya, terutama di daerah terpencil. Menurut mereka, jika akses pendidikan yang layak bisa merata, maka kualitas sumber daya manusia juga akan meningkat.

Pertanyaan 3: Menurut Anda, tantangan atau masalah apa yang nanti akan dihadapi oleh pemerintahan baru? Apa alasannya?

Menurut para informan, tantangan atau masalah yang dihadapi oleh pemerintahan baru adalah kepentingan individu atau kelompok tertentu di dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Itu dapat menghambat pembangunan. Jika kepentingan partai menjadi yang utama, maka pembangunan berkelanjutan akan mengalami gangguan. Kedua, stabilitas ekonomi di tengah situasi global yang tidak menentu. Akhir-akhir ini marak terjadi perang antar negara yang berdampak pada ekonomi global. Bahan pokok naik sementara ketersediaan lapangan kerja menurun. Jika kondisi ini melanda Indonesia, maka inflasi akan terjadi. Ketiga, persoalan stunting. Pembangunan di Indonesia belum merata. Akses ke pedalaman di beberapa wilayah di Indonesia masih sulit ditempuh, sehingga distribusi bantuan berupa makanan dan minuman bernutrisi yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mengalami kendala. Keempat, perihal toleransi beragama. Masih banyak praktik intoleransi agama yang terjadi di tengah masyarakat, misal pelarangan pembangunan tempat ibadah.

Pertanyaan 4: Menurut pendapat Anda, apakah pemerintahan baru nanti mampu mewujudkan secara maksimal Indonesia Emas pada 2045 melalui berbagai program kerjanya? Apa alasannya?

Mayoritas informan percaya bahwa Indonesia Emas 2045 dapat tercapai jika pemerintah berfokus pada pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur. Namun, mereka menekankan bahwa fokus itu harus untuk kemajuan jangka panjang dan mempersiapkan generasi muda untuk bersaing di tingkat global. Sementara, ada 1 informan yang mengatakan bahwa Indonesia Emas 2045 belum bisa tercapai. Persoalannya adalah standar upah di berbagai daerah di Indonesia masih memiliki perbedaan yang signifikan. Artinya, kesenjangannya masih tinggi. Jika upah sudah setara, maka Indonesia Emas 2045 akan terwujud.

Pertanyaan 5: Menurut pendapat Anda, program kerja apa dari pemerintahan lama yang perlu diteruskan oleh pemerintahan baru? Apa alasannya?

Menurut para informan, program kerja Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) perlu dilanjutkan karena sangat membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Masyarakat kelas bawah seperti juru parkir merasa sangat terbantu dengan program-program beasiswa yang diberikan oleh pemerintah. Menurut mereka, program bantuan di sektor pendidikan perlu terus dilanjutkan dan bila perlu ditingkatkan agar keluarga mereka yang menjadi penerima bantuan ini bisa mengenyam pendidikan sebaik mungkin ke jenjang yang lebih tinggi.

Lalu, para informan juga berpendapat bahwa pembangunan jalan dan jembatan perlu dilanjutkan. Tentulah hal ini menjadi vital karena dengan pembangunan jalan dan jembatan, maka terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pembangunan jalan dan jembatan yang baik akan memudahkan akses ke berbagai daerah, termasuk daerah terpencil yang akan mempermudah distribusi barang dan jasa. Di samping itu, juru parkir mengatakan bahwa berbagai program-program kesejahteraan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BPJS, dan program sejenisnya harus diteruskan dan ditingkatkan karena membantu meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan bantuan-bantuan ini, beban hidup mereka dikurangi.

Terakhir, mereka juga berpendapat bahwa program digitalisasi layanan publik perlu dilanjutkan karena mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik dan mengurangi birokrasi yang rumit. Selain itu, program digitalisasi layanan publik memberikan efek positif lainnya bagi masyarakat seperti pengurangan biaya operasional, sehingga kebutuhan atas proses manual dan dokumen fisik tidak menyulitkan masyarakat.

Pembahasan

Nampak bahwa para informan, yakni para juru parkir yang tergolong sebagai masyarakat kelas bawah, menyampaikan harapan-harapan mereka kepada calon presiden dan calon wakil presiden terpilih untuk periode 2024-2029. Mereka berharap agar pemimpin baru ini lebih memperhatikan sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Selain itu, mereka menilai bahwa komunikasi politik yang dijalankan oleh capres dan cawapres tidak akan maksimal karena belum merata. Mereka sebagai representasi masyarakat golongan bawah merasa tidak terlalu memperoleh informasi program kerja yang mudah diakses. Mereka membutuhkan komunikasi yang jelas, langsung, terbuka, dan transparan mengenai program-program yang akan dilaksanakan, meskipun mereka juga menggarisbawahi bahwa partisipasi politik yang mereka lakukan hanya sebatas turut serta di dalam pemilihan umum.

Para informan secara khusus juga berharap agar program-program pemerintah sebelumnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Indonesia Pintar (PIP) dapat dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan. Program-program itu menurut mereka sangat membantu dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka. Mereka juga sangat menekankan pentingnya pemberantasan korupsi sebagai syarat utama keberhasilan pembangunan.

Terkait dengan program-program baru, para informan ini menyampaikan bahwa pemerintah terpilih ntuk meningkatkan tunjangan dan subsidi, seperti bantuan langsung tunai serta bantuan di bidang pendidikan dan kesehatan. Program-program semacam ini dinilai berdampak secara positif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka. Namun, berkaca dari pengalaman sebelumnya, mereka berharap agar pemerintah terpilih meningkatkan diseminasi informasi terkait program-program itu. Hal ini amat penting dalam rangka menciptakan akses yang merata bagi semua golongan masyarakat sehingga pemerintah mampu menjamin ketersediaan layanan publik yang tepat dan inklusif bagi seluruh warga negara.

PENUTUP

Survei sederhana ini menunjukkan bahwa juru parkir sebagai bagian dari masyarakat kelas bawah memiliki harapan yang besar terhadap pemerintahan baru periode 2024-2029. Harapan mereka adalah agar pemerintahan baru ini dapat meningkatkan kesejahteraan melalui perbaikan di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemberantasan korupsi. Mereka menekankan pentingnya komunikasi politik yang inklusif dan transparan, serta perlunya kelanjutan dan peningkatan program-program yang sudah ada seperti PKH, BNPT, dan PIP. Pemerintah diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil, membuka lapangan kerja, dan memperluas akses terhadap layanan publik yang inklusif dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Dishub Aceh [dishub aceh]. (9 April 2024). *Sejarah Petugas Parkir: Dari Awal Hingga Peran Mereka Saat Ini*. Dishub Aceh. Diakses Melalui <https://dishub.acehprov.go.id/sejarah-petugas-parkir-dari-awal-hingga-peran-mereka-saat-ini/> pada Jumat, 28 Jni 2024.
- News media. (2024). *Komunitas Tukang Parkir Di Serang Banten Deklarasi Dukung Prabowo- Gibran Capres Dan Cawapres*. Newsmedia. Diakses melalui <https://vt.tiktok.com/ZSYxbVBuQ/> pada tanggal 2 Juli 2024.

- Perhimpunan Sosialis Revolusioner. (2014). *Perspektif Marxis Untuk Pemilu 2014: Kritik, Analisa, Dan Tugas Kita Perhimpunan Sosialis*. Revolusioner.com. Diakses melalui <https://revolusioner.org/perspektif-marxis-untuk-pemilu-2014-kritik-analisa-dan-tugas-kita/> pada tanggal 2 Juli 2024.
- Santika, E. F. (2024). *Perolehan suara Prabowo-Gibran tertinggi sepanjang sejarah PIIpres RI* [Dataset]. Katadata.

